

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang–Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Menurut Indra Bastian (2006 : 338) otonomi daerah (otda) adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termaksud pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya.

Menurut Hurjuna (dalam Sijabat dkk, 2013) dalam melaksanakan otonomi daerah, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, aspek pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting yang harus di perhatikan oleh setiap pemerintah daerah.

Menurut Halim (dalam Sijabat dkk, 2013) dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah self supporting di dalam bidang keuangan. Artinya daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Sularaso dan Restianto (2011:110) mengatakan dalam organisasi pemerintah mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisien, rasio keserasian, dan pertumbuhan.

Mahmudi (2019:90) juga mengatakan bahwa menganalisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa teknis analisis laporan keuangan, antara lain: analisis varias, rasio keuangan, pertumbuhan, regresi dan prediksi. Hal ini dilakukan tentunya akan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pihak yang terkait dalam melihat kinerja keuangan daerah Kabupaten Nagekeo sebagai dasar pengambilan keputusan.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, serta variabel penunjang lainnya, penting variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah di pandang sebagai bagian dalam penyelenggaraan daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten Nagekeo lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga permasalahan yang dijelaskan diatas beransur-ansur mulai teratasi. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisis laporan yang telah dibuat pemerintah berupa laporan realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi, sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan daerah yang memiliki potensi daerahnya yang relatif sama. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana

posisi keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Nagekeo antara lain :(1) ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat masih sangat tinggi yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer (2) rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dalam menunjang penerimaan daerah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, serta variabel penunjang lainnya, pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah di pandang sebagai bagian kursorial dalam penyelenggaraan daerah.

Kemampuan keuangan daerah yang di maksud adalah sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna untuk membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah di Kabupaten Nagekeo yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan

dan kedadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang di miliki oleh Kabupaten Nagekeo.

Hasil analisis terhadap kinerja keuangan daerah merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan dengan baik. Di samping itu pengukuran kinerja keuangan daerah juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan daerah baik terhadap perhitungan pendapatan maupun belanja daerah perlu di lakukan. Berikut ini tabel laporan realisasi anggaran Kabupaten Nagekeo periode 2017-2021.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2017-2021 dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pendapatan	759,738,196,694.67	696,630,225,672.54	792,635,809,857.57	784,151,338,330.89	700,702,413,295.03
1	Pendapatan Asli Daerah	46,163,603,353.96	30,850,179,938.54	31,068,286,543.57	33,159,170,059.48	33,276,127,700.03
2	Pendapatan Transfer	712,766,182,340.71	559,693,838,683.00	638,951,136,810.00	570,980,766,458.00	651,601,375,462.00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	808,411,000.00	106,086,207,051.00	122,616,386,504.00	180,011,401,813.41	15,824,910,133.00
B	Belanja	735,894,363,109.94	719,985,970,970.34	774,330,245,043.25	721,550,188,332.04	658,967,541,621.84
1	Belanja Operasi	544,897,037,827.00	379,414,390,562.00	394,901,930,764.00	409,115,521,617.00	478,233,112,157.21
2	Belanja Modal	190,180,029,282.94	340,571,580,408.34	379,428,314,279.25	312,434,666,715.04	177,034,170,277.63
3	Belanja Tak Terduga	817,296,000.00	-	-	-	-
C	Defisit	23,843,833,584.73	23,355,745,297.80	18,305,564,814.32	62,601,149,998.85	41,734,871,673.19
D	Pembiayaan	64.854.621.619,21	88.424.836.467,94	63.114.967.554,86	80.110.474.113,64	140.809.188.985,49

Sumber: BKD Kabupaten Nagekeo(Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1.1 laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahun mengalami fluktuasi. Pemerintah daerah dalam mengelola anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dalam mengelola masih digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah sehingga masyarakat di daerah kurang optimal menerima manfaat anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada Anggaran dari pemerintah pusat.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil yang dimana kemampuan keuangan daerah dikaji lebih lanjut terkait tingkat ketergantungan, efektivitas dan indikator kinerja. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2017-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :Bagaimana kinerja keuangan kabupaten Nagekeo dilihat dari rasio Pertumbuhan, rasio keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, rasio Efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah,rasio kemandirian keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Nagekeo 2017 - 2021 ditinjau

dari aspek pertumbuhan, rasio keserasian belanja, efisiensi belanja, efektivitas terhadap PAD, efisiensi keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan keuangan daerah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai keuangan pemerintah daerah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut dalam topik yang sama.

3. Bagi Penulis

Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan khususnya mengenai keuangan pemerintah daerah